



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN OGAN ILIR

M Faturrahman¹, Raniasa Putra², Akhmad Mustain³

mfaturrahmants@gmail.com¹

Universitas Sriwijaya

Abstrak: Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan data pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara manual dan terpisah di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan pengelolaan ini mengakibatkan keterlambatan pengumpulan data, rendahnya akurasi informasi, dan terbatasnya transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi SIPD bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data pembangunan yang lebih akurat, terpusat, dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka kerja Ripley & Franklin sebagai dasar analisis. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber kunci, dan tinjauan dokumen. Penelitian ini berfokus pada tiga dimensi utama: kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir telah dimulai tetapi belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor pendukung implementasi SIPD meliputi kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD serta dukungan internal dari Bappeda untuk mengoptimalkan sistem. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang tidak memadai, koordinasi vertikal yang kurang efektif, dan bimbingan teknis yang kurang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, disarankan agar Bappeda Kabupaten Ogan Ilir memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, SIPD, Bappeda, Kepatuhan, Kinerja, Koordinasi.

Abstract: Before the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), the management of development data at the Regional Planning and Development Agency (Bappeda) of Ogan Ilir Regency was carried out manually and separately among the Regional Apparatus Organizations (OPD). This management approach resulted in delays in data collection, low information accuracy, and limited transparency in regional development planning. The implementation of SIPD aims to achieve more accurate, centralized, and integrated development data management. This study aims to analyze the implementation of SIPD policy at Bappeda Ogan Ilir Regency and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive qualitative method with the Ripley & Franklin framework as the basis for analysis. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with key informants, and document review. This study focuses on three main dimensions: compliance, smooth routine functions, and the realization of the desired performance. The results show that the implementation of SIPD policy at Bappeda Ogan Ilir Regency has started but has not been

fully optimal. Supporting factors for the implementation of SIPD include the central government's policy mandating the use of SIPD and internal support from Bappeda to optimize the system. On the other hand, inhibiting factors include limited human resource (HR) capacity, inadequate infrastructure, ineffective vertical coordination, and insufficient technical guidance from the central government. Therefore, it is recommended that Bappeda Ogan Ilir Regency strengthen HR capacity through technical training, improve technological infrastructure, and enhance coordination with the central government.

Keywords: *Implementation, Policy, SIPD, Bappeda, Compliance, Performance, Coordination.*

PENDAHULUAN

Pengembangan sistem informasi di lembaga pemerintah merupakan bagian dari adopsi praktik e-Government yang lebih luas. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dengan lebih efektif, efisien, dan transparan. Salah satu inisiatif yang diambil pemerintah Indonesia adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan data pembangunan, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya guna mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan secara terpadu.

Sebelum diterapkannya SIPD, pengelolaan data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara manual dan terpisah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses manual ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengumpulan data, rendahnya akurasi informasi, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketergantungan pada proses manual membuat proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih lambat, tidak terstandarisasi, dan sering kali terjadi duplikasi data di berbagai OPD. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta pengambilan keputusan berbasis data.

SIPD, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Melalui penerapan SIPD, pengelolaan data pembangunan daerah dilakukan secara terpusat dan terintegrasi. Setiap OPD diwajibkan menginput data ke dalam sistem yang sama, sehingga mempermudah proses pemantauan dan pengelolaan data secara real-time. Dengan penerapan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Selain itu, penerapan SIPD sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Data yang terintegrasi melalui SIPD memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau pencapaian target SDGs di tingkat lokal. Dengan demikian, penerapan SIPD memiliki implikasi strategis yang luas, baik dari segi pengelolaan data pembangunan, pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), maupun penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, implementasi SIPD di Kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman teknis terkait pengelolaan dan pengoperasian sistem SIPD. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, seperti koneksi internet yang lambat dan perangkat keras yang kurang optimal, juga menjadi kendala dalam penerapan SIPD. Koordinasi lintas OPD yang belum efektif semakin memperumit proses pengumpulan dan penginputan data.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, penguatan infrastruktur teknologi informasi, hingga penguatan koordinasi lintas OPD. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pengintegrasian SIPD dan memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan optimal. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan SIPD telah diimplementasikan di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini akan mengevaluasi tiga aspek utama dari implementasi kebijakan, yaitu tingkat kepatuhan terhadap prosedur SIPD, kelancaran fungsi rutin, serta realisasi kinerja yang diinginkan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIPD di tingkat kabupaten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model Ripley & Franklin sebagai kerangka teoretis. Model ini mengkaji implementasi kebijakan melalui tiga perspektif: kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber kunci, dan analisis dokumen. Narasumber meliputi pejabat Bappeda, pengguna sistem SIPD, dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap pandangan, tantangan, dan pengalaman narasumber. Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung bertujuan untuk memahami proses operasional dan pengelolaan data di lapangan, sementara analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari laporan dan kebijakan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir telah dimulai tetapi belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala teknis dan kelembagaan menjadi penghambat utama dalam proses implementasi. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah kepatuhan terhadap prosedur teknis, kelancaran pelaksanaan fungsi rutin, dan pencapaian kinerja yang diinginkan. Selain itu, faktor-faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah pusat dan komitmen internal Bappeda memberikan peluang untuk memperkuat implementasi SIPD ke depannya. Dengan mengatasi hambatan yang ada, SIPD diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan data yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Kepatuhan

Kepatuhan terhadap prosedur SIPD masih menjadi tantangan bagi Bappeda. Pegawai mengalami kesulitan dalam mematuhi prosedur teknis akibat kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah pusat serta perubahan sistem yang dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Banyak staf Bappeda yang belum terbiasa dengan protokol SIPD, sehingga menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam penginputan data. Selain itu, kesulitan dalam mempelajari prosedur baru yang terus diperbarui tanpa sosialisasi yang memadai semakin memperberat situasi ini. Pelatihan yang terjadwal dan bimbingan teknis yang lebih intensif dari pemerintah pusat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan di kalangan staf Bappeda. Untuk meningkatkan kepatuhan, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan prosedur SIPD, serta adanya pengawasan langsung dari pihak pengelola sistem di tingkat pusat dan daerah.

Kelancaran Fungsi Rutinitas

Kelancaran pelaksanaan fungsi rutin sangat penting untuk keberhasilan operasional SIPD. Penelitian menemukan bahwa beberapa masalah operasional memengaruhi kelancaran fungsi SIPD. Proses penginputan data sering kali mengalami gangguan teknis, termasuk kesalahan sistem, kecepatan pemrosesan yang lambat, dan ketersediaan server yang tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil di wilayah Ogan Ilir semakin memperparah masalah ini, menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam pengisian data. Selain itu, adanya kesulitan teknis dalam pengelolaan data oleh OPD juga memperlambat proses pengumpulan data. Dukungan teknis yang memadai dan peningkatan infrastruktur jaringan, termasuk penguatan jaringan internet, sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Kolaborasi yang lebih erat antara Bappeda, OPD, dan penyedia infrastruktur teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk mempercepat kelancaran pengelolaan data. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah pengadaan sistem redundansi atau cadangan data yang memungkinkan pengalihan sistem secara otomatis jika terjadi gangguan pada server utama.

Terwujudnya Kinerja yang Dikehendaki

Meskipun SIPD mulai menunjukkan manfaat, seperti tersedianya data pembangunan yang lebih terintegrasi, pencapaian kinerja yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Hasil yang diinginkan dari SIPD meliputi peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi data, dan transparansi yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan. Namun, tantangan teknis yang dihadapi selama penggunaan sistem menghambat pencapaian tujuan ini. Sebagai contoh, data yang dihasilkan dari SIPD masih memerlukan verifikasi ulang oleh OPD karena sering kali terdapat kesalahan penginputan data. Optimalisasi kinerja dapat dilakukan dengan mengatasi hambatan teknis dan infrastruktur, menyediakan panduan operasional yang jelas, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Selain itu, realisasi kinerja juga bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Keterlambatan dalam pembaruan data dari OPD berpotensi menghambat penyusunan laporan dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat mengenai tenggat waktu penginputan data dan penguatan sistem pemantauan secara otomatis. Implementasi sistem notifikasi otomatis dapat membantu pengingat penginputan data kepada OPD, sehingga proses pengumpulan data lebih terstruktur dan tepat waktu. Pengembangan dashboard (dashboard) pemantauan kinerja berbasis real-time juga dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa semua proses penginputan data berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, penerapan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Dengan mengatasi hambatan yang ada, SIPD berpotensi memberikan manfaat besar dalam mendukung pengelolaan data pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Ke depan, perlu adanya penguatan kebijakan insentif dan disinsentif bagi OPD yang tepat waktu dan yang terlambat dalam penginputan data. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kelancaran pelaksanaan SIPD secara menyeluruh di tingkat kabupaten.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor Pendukung

1. Mandat Kebijakan Pemerintah: Arahan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD menciptakan dukungan kelembagaan yang kuat untuk

implementasinya. Kebijakan ini memberikan landasan hukum dan regulasi yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menerapkan SIPD dalam pengelolaan data pembangunan. Dengan adanya peraturan ini, Bappeda memiliki legitimasi untuk meminta dukungan teknis dan koordinasi dari OPD yang terkait.

2. **Komitmen Internal:** Dukungan internal dari pimpinan Bappeda memfasilitasi upaya optimalisasi penggunaan sistem dan mendorong kepatuhan pegawai. Dukungan ini dapat berupa instruksi langsung dari pimpinan kepada staf untuk mematuhi prosedur SIPD, penyediaan sumber daya tambahan, dan pengalokasian anggaran untuk pelatihan staf. Komitmen pimpinan juga tercermin dalam pengawasan langsung terhadap kinerja staf serta pemberian apresiasi kepada staf yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan SIPD.
3. **Dukungan Teknis:** Tersedianya dukungan teknis dari penyedia layanan atau pengelola SIPD di tingkat pusat menjadi faktor penting. Dukungan ini meliputi penyediaan panduan teknis, pelatihan, dan bimbingan teknis. Adanya layanan bantuan atau "help desk" yang responsif memungkinkan staf Bappeda memperoleh solusi atas permasalahan teknis dengan cepat, sehingga proses penginputan data dapat berjalan lancar.

Faktor Penghambat

1. **Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Keterbatasan kapasitas teknis dan kesenjangan pengetahuan di antara staf Bappeda menghambat penggunaan sistem secara efektif. Banyak staf yang kesulitan dalam mengoperasikan SIPD, terutama dalam hal penginputan data yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sebagian besar staf belum memiliki kompetensi teknis yang memadai terkait sistem informasi dan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, perlu diadakan pelatihan berkala dan pendampingan teknis kepada para pengguna SIPD di Bappeda dan OPD terkait.
2. **Infrastruktur Teknis:** Infrastruktur teknis yang tidak memadai, termasuk akses internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang optimal, menghambat efisiensi SIPD. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat menjadi prasyarat utama dalam penerapan sistem berbasis daring seperti SIPD. Di Kabupaten Ogan Ilir, gangguan internet yang sering terjadi mengakibatkan keterlambatan dalam pengisian data ke dalam sistem. Selain itu, perangkat keras seperti komputer dan server yang digunakan untuk mengakses SIPD juga perlu diperbarui agar kompatibel dengan sistem terbaru.
3. **Koordinasi Lintas OPD:** Salah satu penghambat utama dalam implementasi SIPD adalah lemahnya koordinasi antar OPD. Pengelolaan data yang terintegrasi mengharuskan setiap OPD untuk menginput data secara tepat waktu dan akurat. Namun, masih banyak OPD yang terlambat dalam mengirimkan data ke Bappeda, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data. Koordinasi lintas OPD memerlukan pertemuan rutin, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta penerapan sanksi bagi OPD yang tidak mematuhi tenggat waktu penginputan data.
4. **Bimbingan Teknis:** Keterbatasan bimbingan teknis dari pemerintah pusat atau pihak pengelola sistem juga menjadi penghambat. Sering kali, perubahan prosedur pengelolaan data di SIPD tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada OPD dan Bappeda. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan staf terkait cara penginputan data dan langkah-langkah teknis lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan intensif dan pendampingan dari tenaga ahli SIPD di tingkat daerah.
5. **Kendala Adaptasi terhadap Perubahan:** Adaptasi terhadap sistem baru seperti SIPD

memerlukan waktu dan upaya yang besar. Pegawai yang terbiasa dengan metode manual sering kali mengalami resistensi terhadap penggunaan sistem berbasis teknologi. Proses adaptasi ini dapat diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis, yang mengakibatkan hambatan dalam transisi dari pengelolaan data manual ke sistem SIPD.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan data pembangunan daerah. Meskipun pelaksanaan SIPD telah dimulai, prosesnya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kendala utama meliputi masalah kepatuhan terhadap prosedur teknis, gangguan teknis, dan infrastruktur yang tidak memadai. Faktor-faktor pendukung seperti mandat kebijakan dari pemerintah pusat dan dukungan internal dari pimpinan Bappeda memainkan peran penting dalam memfasilitasi implementasi.

Untuk mengoptimalkan kinerja SIPD, disarankan agar Bappeda berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pengadaan infrastruktur teknologi yang lebih memadai, dan peningkatan koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan data pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Afriansyah, E. A. (2018). Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 53–63. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i2.260>
- Ahmad Fahmi Arief, R. H. (2021). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 4(70), 732–749.
- Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. 1–54.
- Al Fatih, Andi, 2010, Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka \ Memberdaya Usaha Kecil), UNPAD PRESS, Bandung.
- Andika, T. H., Setiawan, A. E., Feriyanto, D., & Afdhalluddin, A. (2020). Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU) Universitas Aisyah Pringsewu*, 2(3), 144–147.
- Apniwansyah, G., Widiantara, I. P., & ... (2022). Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Societas: Jurnal Ilmu ...*, 11(April), 96–108. <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4350>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design* (Vol. 15, Issue 2).
- Deseverians, W. (2020). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 7(1), 13–30.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk Nanda. *Otonomi* Vol. 21 Nomor 1, 21(1), 62–79. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Fatta, H. Al. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Andi. <https://bit.ly/3103nS0>
- Fauzi, I. (2018). PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAPPEDA KOTA SURAKARTA TUGAS. 7(2), 44–68.
- Frans, D., Faradina, & Utami. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Heldan, E., Malik, M., & Pratito, M. A. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro). *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik (e-JKPP)*, 7(2), 1–12. <http://jurnal.uhl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/2106>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Government*, 1(2), 1– 8.
- Kemendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016(1038), 1–19.
- Langbein, L. (2014). Public Program Evaluation. In *Public Program Evaluation*. <https://doi.org/10.4324/9781315701363>
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, and johny saldana. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Vol. 148. SAGE, USA.